



**SUPERVISI ASIMETRIS HAKIM DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF
INDONESIA**
(Perspektif Hukum Kelembagaan Negara)

Nama : Dwi Wahyudi

Nim : 1710611052



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

SUPERVISI ASIMETRIS HAKIM DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF INDONESIA

(Perspektif Hukum Kelembagaan Negara)

Disusun Oleh:

**DWI WAHYUDI
1710611052**

**Tugas Akhir Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
TAHUN
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

JUDUL :

**Supervisi Asimetris Hakim Dalam Kekuasaan Yudikatif Indonesia
(Perspektif Hukum Kelembagaan Negara)**

DWI WAHYUDI

1710611052

Tugas Akhir ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan
Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 13 Februari 2021

Mengetahui,

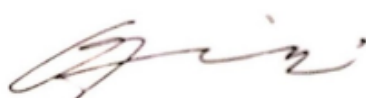
Dekan

Kaprogdi


(Dr. H. Abdul Halim, M.Ag)
NIP. 196706081994031005


(Taupiqurrahman, S.H., M.Kn)
NIP. 198701022019031006

Pembimbing


(Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H.)
NIP/NIDN. 196005021986031003/0002056002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel jurnal ini diajukan oleh :

Nama : Dwi Wahyudi
NIM : 1710611052
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : Supervisi Asimetris Hakim Dalam Kekuasaan Yudikatif
Indonesia (Perspektif Hukum Kelembagaan Negara)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Heru Suyanto, S.H., S.H.
Ketua Penguji

Khoirur Rizal L, S.H., M.H.
Anggota I

Dr. Taufiqurrahman S, S.H., M.H.
Anggota II



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.
Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 13 Februari 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk artikel jurnal yang telah saya *submit/LoA/publish* adalah benar hasil karya saya sebagai Penulis Pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan artikel jurnal tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Dwi Wahyudi

NIM 1710611052

Tanggal : 24 Mei 2021

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'SI METERAI TEMPEL', and '10684 JXQ 4 11-099'. Below the signature is a long horizontal line.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
~~AKHIR/ARTIKEL JURNAL/TESIS~~ UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

SEBAGAI CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA, SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama : Dwi Wahyudi

NIM : 1710611052

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis~~

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**SUPERVISI ASIMETRIS HAKIM DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF
INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA)**

Jakarta, 24 Mei 2021



Dwi Wahyudi

SUPERVISI ASIMETRIS HAKIM DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA)

Dwi Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450
E-mail : wahyudidwi744@gmail.com

Abstrak

Supervisi atau pengawasan terhadap hakim merupakan hal yang penting guna memastikan fungsi peradilan berjalan dengan baik dan efisien. Setiap hakim pada hakikatnya memiliki porsi yang sama atas pengawasan. Namun demikian, pada praktiknya saat ini supervisi terhadap hakim konstitusi hanya dilaksanakan secara internal oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai unsur lanjutannya, sedangkan supervisi terhadap hakim lainnya diselenggarakan secara berlapis, yakni secara internal oleh Mahkamah Agung (MA) dan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY). Pengawasan yang berpola asimetris antara hakim konstitusi dengan hakim lainnya tersebut merupakan keadaan hukum yang cukup menjadi sorotan. Hadirnya paradigma pragmatis masyarakat bahwa status kedudukan MK lebih tinggi dari MA merupakan salah satu residu yang timbul dari dilaksanakannya supervisi asimetris tersebut. Untuk itu, penelitian ini dihadirkan sebagai upaya pengkajian untuk mendalami fenomena supervisi asimetris hakim ditinjau dari perspektif hukum kelembagaan negara. Peneliti dalam penulisan ini memilih jenis penelitian yuridis normatif, yang kemudian dipadukan dengan tiga pendekatan, yakni *statute approach*, *conceptual approach*, dan *historical approach*. Dari hasil penelitian didapati bahwa penyelenggaraan supervisi asimetris hakim bukanlah didasari atas perbedaan status kedudukan antara hakim konstitusi dengan hakim lainnya, melainkan hadir karena keadaan hukum dan pertimbangan hukum yang kompleks sehingga pengawasan terhadap seluruh hakim belum dapat diselenggarakan dengan seragam. Didapati pula bahwa MA secara ketatalembagaan negara memiliki derajat kedudukan yang sama dengan MK, hal yang membedakan hanyalah kompetensi peradilannya.

Kata Kunci: Hakim, Supervisi, *Auxiliary State`s Organ*.

Asymmetrical Supervision of Judge in Indonesia's Judicative Powers (State Institutional Law Perspective)

Dwi Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450
E-mail : wahyudidwi744@gmail.com

Abstract

Supervision of judges is important to ensure the functioning of the judiciary runs well and efficiently. Each judge essentially has the same portion of supervision. However in practice currently, supervision of the constitutional judges is only carried out internally by the Ethics Council of the Constitutional Judges and by the Honorary Council of the Constitutional Court as the advanced element, while the supervision of other judges is carried out in layers, it is carried out by Supreme Court (as internal supervisin) and the Judicial Commission (as external supervision). The asymmetrical pattern of supervision between the constitutional judges and other judges constitutes a legal situation which is being spotlight. The presence of the pragmatic paradigm of society that the status of the Constitutional Court is higher than the Supreme Court is a residue that arises from the implementation of this asymmetric supervision. For this reason, this research is presented as an assessment effort to explore the phenomenon of asymmetric supervision of judges from the perspective of state institutional law. Researchers in this paper chose the type of normative juridical research, which was then combined with three approaches, those were the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. From the results of this research, it was found that the implementation of asymmetric supervision of judges was not based on differences in status between constitutional judges and other judges, but it was present due to legal conditions and complex legal considerations, so that the supervision of all judges could not been carried out uniformly yet. It was also found that the Supreme Court institutionally has an equivalent position as the Constitutional Court, the only thing that distinguishes the two is the judicial competence.

Keywords: Judge, Supervision, Auxiliary State's Organ.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan lancar. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Namun demikian, di samping itu penulis memiliki pula tujuan hakiki dari disusunnya tugas akhir ini, yakni sebagai unsur pemenuh frasa “Sebagai bekal masa depan bangsa” yang selalu penulis lafalkan dalam janji siswa pada jenjang-jenjang pendidikan penulis sebelumnya.

Penulis sangat menyadari hasil penyusunan tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan lekat dengan kekurangan, baik dari sudut pandang ilmiah maupun tata bahasa. Untuk itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan sebagai respon dari pembaca sekalian.

Pada kesempatan ini, penulis juga ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis yang tidak pernah selesai memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dorongan semangat sepanjang penulisan tugas akhir ini;
2. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn.. selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Bapak Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis;

7. Seluruh Civitas Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, khususnya Civitas Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT memberikan balasan adil-Nya kepada setiap pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan dan Manfaat.....	4
BAB 2 PENELITIAN TERDAHULU DAN METODOLOGI	
A. Penelitian Terdahulu/ Literature Review	6
B. Metode Penelitian	8
BAB 3 PEMBAHASAN	
A. Supervisi Asimetris Hakim dalam Perspektif Ketatalembagaan Negara	11
B. Status Kesetaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi	25
BAB 4 PENUTUP	
A. Simpulan	32
B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	
ARTIKEL KL	